



P E N E T A P A N

Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Arafik S. Palili bin Sawa Palili, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGTK, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I; dan

Khaerani S. Tunggeng binti Seling Tunggeng, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGTK, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa buktinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 19 Januari 2017 Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bgi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2010, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, dinikahkan oleh

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung kandung Pemohon II dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Marsidi S. Tunggeng dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Jamaludin dan Yuswan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai dua anak bernama :
 1. Nul Khatimah, lahir di Desa Tinakin Laut, 18 Januari 2010 (perempuan) umur 7 tahun;
 2. Iqwan , lahir di Desa Tinakin Laut, 03 April 1013 (laki-laki) umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan ltsbat Nikah Untuk mendapatkan Buku Nikah dan pengurusan kelengkapan data-data kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut;;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal pada tanggal 20 Januari 2017 Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bgi., Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) saksi sebagai berikut :

1. Jamaludin Jabara bin Jabara, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai Sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut; pada tanggal 09 Maret 2010;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah saudara kandung kandung Pemohon II, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Marsidi S. Tunggeng karena ayah kandung Pemohon II (Almarhum);;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bernama Jamaludin dan Yuswan;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan dikaruniai dua anak bernama :
 1. Nul Khatimah, lahir di Desa Tinakin Laut, 18 Januari 2010 (perempuan) umur 7 tahun;
 2. Iqwan , lahir di Desa Tinakin Laut, 03 April 1013 (laki-laki) umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Untuk mendapatkan Buku Nikah dan pengurusan kelengkapan data-data kependudukan;
- 2. Yuswanto bin Yunus, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Bangai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai kakak ipar;
 - Bahwa para Pemohon dahulu telah menikah menurut hukum Islam di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut; pada tanggal 09 Maret 2010;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah saudara kandung kandung Pemohon II, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Marsidi S. Tunggeng karena ayah kandung Pemohon II (Almarhum),,

- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bernama Jamaludin dan Yuswan;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sampai sekarang hanya beristri Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, dan dikaruniai dua anak bernama :
 1. Nul Khatimah, lahir di Desa Tinakin Laut, 18 Januari 2010 (perempuan) umur 7 tahun;
 2. Iqwan , lahir di Desa Tinakin Laut, 03 April 1013 (laki-laki) umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Untuk mendapatkan Buku Nikah dan pengurusan kelengkapan data-data kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 09 Maret 2010 sebagaimana pengakuan para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 09 Maret 2010 di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Jamaludin Jabara bin Jabara dan Yuswanto bin Yunus;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Arafik S. Palili bin Sawa Palili dan Khaerani S. Tunggeng binti Seling Tunggeng adalah suami isteri, yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 09 Maret 2010 di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut;;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah saudara kandung kandung Pemohon II dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Marsidi S. Tunggeng karena ayah kandung Pemohon II (Almarhum),, dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing bernama bernama Jamaludin dan Yuswan serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 30 tahun dan status Pemohon II adalah perawan dalam usia 28 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan dikaruniai dua anak bernama :
 1. Nul Khatimah, lahir di Desa Tinakin Laut, 18 Januari 2010 (perempuan) umur 7 tahun;
 2. Iqwan , lahir di Desa Tinakin Laut, 03 April 1013 (laki-laki) umur 4 tahun;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah Untuk mendapatkan Buku Nikah dan pengurusan kelengkapan data-data kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya sebuah perkawinan haruslah dipenuhi unsur/rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan tersebut adalah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perkawinan antara para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

وشاهدين ولي نحو من وشروطه صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفي
عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arafik S. Palili bin Sawa Palili) dengan Pemohon II (Khaerani S. Tunggeng binti Seling Tunggeng) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut;;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh kami Dani Haswar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	91.000,-

Terbilang: *sembilan puluh satu ribu rupiah*

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)